

ABSTRAK

WAYAN SRADA. NIM: E. 1811300. **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi PT. Garuda Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt).** Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, 2023.

Penerapan pasal dalam UU PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah karyawan badan usaha milik negara yang mana selalu menimbulkan perbedaan pandangan dari para kalangan hukum. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan ketentuan tersebut diatas Khususnya pada PT. Garuda Indonesia dalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan penerapan pidana materilnya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Serta penerapan pidana materil dalam pasal 13 berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kesimpulan penelitian adalah diketahui pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diketahui bahwa banyak sekali bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan. Seperti bentuk tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Pidana, Korupsi

ABSTRACT

WAYAN SRADA. NIM: E. 1811300. *Law Enforcement Against Corruption Crimes PT. Garuda Indonesia According to Law Number 20 of 2001 (Decision Analysis Number 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt)*. Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University Bogor, 2023.

The application of the article in the PTPK Law against a criminal act of corruption which clearly has fulfilled its elements often experiences erroneous application by both prosecutors, judges and legal advisors. Especially if the perpetrators of corruption are employees of state-owned enterprises which always cause different views from legal circles. The purpose of writing this research is to find out and analyze the regulation of corruption according to law number 20 of 2001 and to find out and analyze the application of the provisions mentioned above, especially at PT. Garuda Indonesia in Decision Number 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt. Research methods are needed to collect a number of materials that are used to answer juridical analysis. Starting from the problem, the research method used is normative juridical research method, namely law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. The results of the study show that the application of material punishment is punishable by imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and/or a fine of at least IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of IDR 250,000,000 .00 (two hundred and fifty million rupiah). As well as the application of material punishment in Article 13 in the form of a maximum imprisonment of 3 (three) and/or a maximum fine of Rp. 150,000,000.00 (one hundred fifty million rupiah). The conclusion of the study is that it is known that the regulation of criminal acts of corruption according to Law Number 20 of 2001 shows that there are many forms of criminal acts of corruption that have been committed. As a form of corruption, giving or promising something to civil servants is regulated in Article 5 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: Enforcement, Law, Criminal, Corruption